



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## KECAMATAN LELES

Jalan Raya Leles No. 27 Tlp. 0262 455003 Fax. 0262 455003

### NOTULEN

Dasar : Surat Tugas Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut Nomor: 400.14.1.1/ 46 -Kec lls Tanggal 26 Januari 2026

Tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Agenda : Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Leles, Kadungora dan Banyuresmi

Pelaksanaan : Kegiatan dilakukan dengan menghadiri langsung dan mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Kecamatan Leles, Kadungora dan Banyuresmi yang diselenggarakan di Aula STAI Siliwangi Leles

Rangkaian acara Musrenbang Kecamatan Leles, Kadungora dan Banyuresmi adalah sebagai berikut:

- Pembukaan
- Pembacaan Ayat Suci Alqur'an
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya"
- Laporan Pelaksanaan Musrenbang
- Sambutan DPRD
- Laporan Sidang Pleno
- Arahan Musrenbang oleh Kepala Daerah
- Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Usulan Prioritas Kecamatan
- Do'a dan Penutup

Berikut beberapa poin penting dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Leles, Kadungora dan Banyuresmi adalah sebagai berikut:

#### A. Pembukaan Musrenbang (Kaban – Bappeda)

- Pelaksanaan Musrenbang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pimpinan berkenan hadir secara langsung, dengan mekanisme penggabungan beberapa kecamatan, sebagai bentuk arahan langsung pimpinan.
- Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Ranwal RKPD Tahun 2027 pada tanggal 22 Januari 2026. Forum tersebut menjadi ruang awal untuk menghimpun aspirasi dan pandangan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan RKPD 2027, sekaligus menjadi landasan awal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan agar berada dalam satu koridor pembangunan Tahun 2027.
- Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan strategis yang menjembatani aspirasi masyarakat desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata.

- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dijadwalkan pada tanggal 27 Januari sampai dengan 10 Februari 2026, dengan mekanisme pengelompokan kecamatan yang berdekatan. Pola ini merupakan bentuk efisiensi pendekatan kewilayahan serta penguatan sinergi pembangunan antarwilayah.
- Tahapan pelaksanaan terdiri atas Sidang Pleno I untuk membahas usulan desa, dan Sidang Pleno II untuk melakukan penyepakatan terhadap hasil sidang kelompok.
- Sejak pelaksanaan kegiatan ini, para camat dan kepala desa diharapkan dapat melaksanakan Musrenbang dengan sebaik-baiknya. Pimpinan berharap adanya pemahaman bersama bahwa keterbatasan anggaran daerah merupakan realita yang harus dihadapi bersama, sehingga usulan yang diajukan harus bersifat prioritas, memiliki urgensi tinggi, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Garut.
- Setiap usulan yang dibahas harus dapat diinput ke dalam SIPD. Oleh karena itu, sejak awal pembahasan, usulan harus sesuai dengan kewenangan pemerintahan, arah pembangunan daerah, serta memenuhi kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
- Pemilahan dan penajaman usulan yang baik sejak awal akan mengurangi koreksi pada tahapan selanjutnya serta meningkatkan kredibilitas hasil Musrenbang. Oleh karena itu, para camat diharapkan dapat mengawal proses secara ketat, tertib dalam pengusulan, serta memastikan sinkronisasi program dan kegiatan yang diusulkan.

#### **B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan – (Sekmat Leles)**

- Tujuan kegiatan ini adalah membahas dan menyepakati usulan kegiatan Tahun 2027 yang menjadi prioritas pembangunan wilayah masing-masing kecamatan.
- Peserta Musrenbang diwakili oleh Kecamatan Leles dan Kecamatan Kadungora, dengan jumlah peserta kurang lebih 170 orang yang terdiri atas Kepala Desa, BPD, LPM, MUI, TP PKK, serta para UPT kewilayahan.

#### **C. Sambutan DPRD – Pak Yudha Puja Turnawan ( Fraksi PDI P )**

- Berkaitan dengan kapasitas fiskal yang terbatas, dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami pengurangan sebesar Rp78 miliar pada Tahun 2025. Pada Tahun 2026, dana transfer kembali dipangkas sebesar Rp414 miliar. Kondisi tersebut juga berdampak pada Pemerintah Desa yang turut mengalami efisiensi anggaran.

- Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, harapan saya selaku anggota DPRD agar Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Peraturan Daerah tentang CSR telah ditetapkan sejak Tahun 2017 dan pada Tahun 2025 telah dilakukan revisi oleh Bupati, sehingga perlu segera dibentuk Forum CSR untuk mendukung pembangunan daerah.
- Sebagai contoh, ketika terjadi kerusakan tanggul di tengah tahun anggaran dan Dinas PUPR tidak memiliki alokasi anggaran, perbaikan dapat dilakukan melalui dana CSR dari Bank BJB berdasarkan proposal yang diajukan. Hal ini menunjukkan pentingnya percepatan pembentukan Forum CSR.
- Contoh lainnya adalah penanganan rumah tidak layak huni, di mana kolaborasi pendanaan dapat dilakukan, salah satunya melalui kontribusi Perumda BPR Garut yang memberikan bantuan.
- Terdapat potensi dana CSR yang sangat besar di berbagai perusahaan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah, Forum CSR dapat diarahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penanganan berbagai permasalahan pembangunan.
- Selanjutnya, diperlukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik di tingkat kabupaten maupun desa. Salah satu contohnya adalah potensi kehilangan (loss) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) yang mencapai sekitar Rp3 miliar berdasarkan perhitungan Bapenda. Dalam hal ini, peran Forkopimcam dan Satpol PP menjadi sangat strategis.
- Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana transfer, mengingat Pemerintah Pusat juga memiliki program-program strategis nasional yang harus diprioritaskan
- Oleh karena itu, Musrenbang diharapkan mampu menghasilkan usulan yang benar-benar prioritas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta memiliki tingkat urgensi yang tinggi.
- Optimalisasi pajak daerah, termasuk pajak hotel dan restoran yang masih belum maksimal, juga perlu terus ditingkatkan.
- Angka stunting serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi memerlukan penguatan layanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas beserta layanan PONEC.
- Saya berharap seluruh pihak dapat lebih disiplin dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi.
- Termasuk persoalan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih cukup besar dan tersebar di setiap

kecamatan. Musrenbang tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, sehingga Bappeda perlu memperkuat komunikasi dan sinkronisasi dengan SKPD agar intervensi pembangunan lebih tepat sasaran.

- Dengan demikian, optimalisasi CSR dan PAD menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Garut.

#### **D. Laporan Sidang Pleno I**

- **Kecamatan Leles:** Rekonstruksi Jalan Desa Cipancar; Bantuan Modal melalui KUBE bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Desa Salamnunggal; Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Ciburial dan Desa Kandangmukti; Rekonstruksi Jalan Desa Dano; Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa Jangkurang; Rekonstruksi Jalan Desa Cangkuang; Pengelolaan Sistem Drainase Jalan Pasopati Desa Leles; Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Non Hijau Desa Leles; Bantuan Rutilahu Desa Haruman; Rehabilitasi Jalan Desa Dano; Bantuan Rutilahu Desa Margaluyu; serta Rekonstruksi Jalan Desa Sukalame.
- **Kecamatan Kadungora:** Pembangunan Masjid Besar Kecamatan Kadungora; Pembangunan Lapang Jaya Bakti Desa Karangmulya; Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Kampung Rancasalak; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Candramekar; Perbaikan Jalan Kabupaten di Desa Tanggulun; Bantuan Rutilahu Desa Tanggulun; Perbaikan Irigasi Cisalak dan Bayongbong Desa Tanggulun; Bantuan Rutilahu Desa Karangmulya; serta Bantuan Rutilahu Desa Harumansari.
- **Kecamatan Banyuresmi:** Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu); Pembangunan Jembatan Desa Sukalaksana; Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Desa Sukakarya; Perbaikan Jalan Hotmix Kampung Seukeu; Perbaikan Jalan dan Drainase Ruas Maleer–Leuwigoong; Pembangunan Jalan Desa Jamburea; Perbaikan Jalan Sukaratu; Perbaikan Jalan Desa Cipitung; Pembangunan Jalan Desa Binakarya; Pembangunan Jalan Desa Karyamukti; Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Desa Dangdeur; serta Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Karyasari.

#### **E. Arahan Musrenbang oleh Kepala Daerah (Bu Wabup)**

- Bapak Bupati menyampaikan keinginan untuk mengawal langsung proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan. Penggabungan 2–3 kecamatan dilakukan agar pelaksanaan lebih ringkas dan efisien, serta memberikan ruang

waktu di akhir bagi Kepala Daerah untuk memahami dan menegaskan prioritas pembangunan.

- Pembatasan kapasitas keuangan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan fiskal, diperlukan kepemimpinan yang kreatif. Pendanaan pembangunan tidak harus selalu bersumber dari APBD, tetapi dapat dioptimalkan melalui sumber lain seperti CSR, dan hal tersebut patut didukung.
- Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa masih banyak proposal yang diajukan tanpa ketepatan sasaran. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) perlu segera dibentuk untuk melakukan analisis dan mengarahkan pemanfaatan dana CSR. Bahkan, tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan skema pendanaan alternatif seperti crowdfunding.
- Dengan keterbatasan anggaran, daerah harus mampu menentukan pilihan secara bijak. Sebagai contoh, bantuan Rutilahu sebesar Rp15 juta per unit yang disebar luas sering kali tidak cukup untuk penyelesaian yang tuntas. Perlu dipertimbangkan fokus pada jumlah unit yang lebih sedikit, tetapi dengan hasil yang benar-benar layak dan selesai.
- Pola pikir pembangunan perlu diubah, dari sekadar memikirkan bagaimana daerah mendapatkan uang, menjadi bagaimana daerah mampu menghasilkan pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Mindset membangun ini harus tumbuh dan dipahami bersama.
- Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pencitraan, tetapi harus berfokus pada kebermanfaatan. Banyak infrastruktur dibangun namun tidak termanfaatkan secara optimal, sehingga pembangunan hanya bernilai proyek, bukan nilai manfaat, dan berpotensi mewariskan persoalan di kemudian hari.
- Angka stunting di Kecamatan Leles merupakan yang tertinggi di Kabupaten Garut dan harus menjadi perhatian serius. Perlu ditelusuri faktor penyebabnya, baik dari pola asuh maupun kecukupan gizi. Dampak stunting tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada daya saing anak di masa depan, yang berpotensi memperpanjang rantai pengangguran dan kemiskinan.
- Pada Tahun 2027, upaya penanganan stunting akan diperkuat, termasuk dengan adanya insentif yang akan dipusatkan di Kecamatan Leles.
- Saat ini, hanya terdapat dua kecamatan yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu Kecamatan Leles dan Kecamatan Cisurupan, khususnya pada kawasan Cangkuang dan TWA Papandayan. Potensi ini perlu dimaksimalkan secara

terencana dan berkelanjutan.

- Bantuan kepada UMKM dapat diberikan, namun perlu pengawasan yang ketat terhadap kinerjanya. Apabila tidak menunjukkan perkembangan, maka pendekatan pemberdayaan dapat diarahkan melalui pelatihan keterampilan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.
- Usulan pembangunan drainase dan Tembok Penahan Tanah (TPT) dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan longsor perlu menjadi perhatian dan pertimbangan Pemerintah Kabupaten.
- Perbaikan Alun-Alun Leles pada prinsipnya disetujui, namun alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang tepat. Mengingat lokasinya yang strategis sebagai jalur menuju Garut, kawasan ini berpotensi mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
- Pelaksanaan Car Free Day (CFD) diharapkan tidak menghambat kelancaran arus transportasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditentukan lokasi yang paling tepat dan mendukung.
- Kawasan industri harus mendapatkan dukungan yang optimal untuk mewujudkan ekosistem peradaban industri. Desa-desa yang memiliki kawasan industri seharusnya mampu meningkatkan pendapatan melalui pola kerja sama dengan pihak industri. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan ekosistem investasi dan industri yang kondusif.
- Forkopimcam diharapkan dapat terus berkolaborasi secara aktif dalam menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Garut, sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Dibuat di Leles

Pada tanggal 27 Januari 2026



**SITI MUSAADAH, S.SOS**

Nip. 197606102007012009